



KORAN	HAL
Haluan	11
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Wako Serahkan LKPD ke BPK RI Sumbar

Penyerahan LKPD Tahun 2021 Kepada BPK Sumbar dari Pemda di Sumatera Barat



MENANDATANGANI LKPD - Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusna Dewi menandatangani LKPD Kota Solok 2021 disaksikan Wali Kota Solok Zul Elfian Umar Rabu(2/3). Kota Solok menyerahkan LKPD 2021 untuk dilakukan audit oleh BPK RI. ALFIAN

SOLOK, HALUAN – Baru dua bulan memasuki tahun anggaran 2022, Wali Kota Solok Zul Elfian Umar langsung menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Solok ke Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar di aula BPK Sumbar, Rabu (2/3).

Penyerahan LKPD Kota Solok diterima langsung kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusna Dewi, turut hadir saat penyerahan LKPD Kota Solok, kepala Inspektur Kenfilka, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Novirna Hendayani.

Wali Kota Solok Zul Elfian Umar usai penyerahan mengatakan, setiap daerah wajib menyerahkan LKPDnya minimal dalam tiga bulan anggaran berjalan. Penyerahan LKPD juga sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipatif.

“Nantinya tentu LKPD yang diserahkan dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh BPK- RI Perwakilan Sumbar, hasil pemeriksaan diharapkan bisa membahakan hasil bahkan bisa mengukir prestasi Kota Solok terhadap kinerja Pemerintah Kota Solok,” kata Wali Kota.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusna Dewi mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi pada Pemerintah Kota Solok yang sudah menyerahkan LKPD tahun 2021. Bahkan penyerahan diakui

lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

“Hanya dua bulan tahun anggaran berjalan sudah masuk laporan 2021. Ini suatu bukti sistem yang berjalan di Kota Solok sangat baik,” ucapnya.

Kata Yusna Dewi, sebelumnya BPK sudah melakukan pemeriksaan interim yang tidak terpisah dengan pemeriksaan terinci. Ke depan Kantor Akuntan Publik (KAP) atas nama BPK melakukan pemeriksaan ke Kota Solok.

Walau dibantu KAP, kata Yusna Dewi tidak semua audit diberikan pada akuntan publik. Untuk lembaga negara bersifat rahasia masih dikerjakan auditor BPK. Sedangkan kantor akuntan publik membantu audit bersifat umum.

“Pemeriksaan rutin yang dilakukan KAP ditetapkan ke beberapa entitas di pemerintahan pusat dan daerah yang sudah beberapa kali mencapai status pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian(WTP). Intinya pemeriksaan oleh KAP merupakan hal yang bagus, karena syaratnya daerah opininya sudah WTP dan resiko tidak terlalu tinggi, temuan yang ada berakibat bahkan jangan sampai ada temuan berulang dengan tahun yang sama,” tutur Yusna Dewi. (h/alf)